

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG

:

01 - Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing
3. PROGRAM

:

Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
4. PRIORITAS NASIONAL

| KODE  | PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                                                                    | ALOKASI 2025 (RIBU) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02    | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | 6.121.943,0         |
| 02.08 | Diplomasi Ekonomi                                                                                                                                                                                                                         | 1.121.943,0         |
| 02.16 | Ekonomi Digital                                                                                                                                                                                                                           | 5.000.000,0         |
| 03    | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | 4.485.000,0         |
| 03.06 | Pendalaman Sektor Keuangan                                                                                                                                                                                                                | 4.485.000,0         |
| 04    | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas                                      | 7.500.000,0         |
| 04.06 | Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                                  | 7.500.000,0         |
| 05    | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | 28.122.645,0        |
| 05.01 | Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor                                                                                                 | 700.000,0           |
| 05.02 | Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru                                                                                                                                                       | 13.600.000,0        |
| 05.03 | Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional                                                                                                                                                            | 2.000.000,0         |
| 05.04 | Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                                                                                                                                                                         | 10.822.645,0        |
| 05.05 | Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global                                                                                                                        | 1.000.000,0         |

| KODE  | PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS                                                                                                      | ALOKASI 2025 (RIBU) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 07    | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | 909.861,0           |
| 07.14 | Pengendalian Inflasi                                                                                                                        | 909.861,0           |
| Total |                                                                                                                                             | 47.139.449,0        |

## 5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

| KODE  | SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)                                                                                                  | TARGET 2025       | ALOKASI 2025 (RIBU) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 01    | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas                                                   |                   | 13.500.000,0        |
| 01.01 | Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN yang Berhasil diselesaikan                                                                             | 90                |                     |
| 01.02 | Total Asset Turnover BUMN                                                                                                                          | 0,31              |                     |
| 01.03 | Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri               | 90                |                     |
| 01.04 | Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN                                                  | 90                |                     |
| 01.05 | Nilai Penyaluran KUR                                                                                                                               | 266-296           |                     |
| 02    | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas                                                          |                   | 17.100.000,0        |
| 02.01 | Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara potensial, negara mitra utama, negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional (PTA/FTA/CEPA)            | 22 (akumulatif)   |                     |
| 02.02 | Jumlah Dokumen Initial Memorandum Akses OECD                                                                                                       | 1                 |                     |
| 02.03 | Nilai PMA dan PMDN                                                                                                                                 | 1.868,23-1.905,60 |                     |
| 02.04 | Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral, Regional, dan Multilateral                                                          | 40                |                     |
| 02.05 | Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian | 3                 |                     |
| 02.06 | Tingkat Inflasi                                                                                                                                    | 1,5-3,5           |                     |
| 02.07 | Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                               | 85                |                     |
| 02.08 | Persentase Penyelesaian Isu terkait Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri                      | 90                |                     |
| 02.09 | Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi                                                         | 90                |                     |
| 03    | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan Dan Ekonomi Digital yang Berkualitas                                                            |                   | 16.500.000,0        |

| KODE  | SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)                                                                                     | TARGET 2025             | ALOKASI 2025 (RIBU) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 03.01 | Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB                                                                                               | 8-9                     |                     |
| 03.02 | Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa                                                                                                     | 21-21,6                 |                     |
| 03.03 | Indeks Literasi Keuangan                                                                                                              | 57,25                   |                     |
| 03.04 | Biaya Logistik terhadap PDB                                                                                                           | 13,5                    |                     |
| 03.05 | Indeks Keberdayaan Konsumen                                                                                                           | 63                      |                     |
| 03.06 | Persentase Penyelesaian Isu terkait Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri           | 90                      |                     |
| 03.07 | Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital                                              | 90                      |                     |
| 04    | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Energi Dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas                                               |                         | 0,0                 |
| 04.01 | Indeks Ketahanan Energi                                                                                                               | 6,77                    |                     |
| 04.02 | Pencapaian Jumlah Volume BBM Bersubsidi                                                                                               | 19,41                   |                     |
| 04.03 | Pertumbuhan PDB Listrik                                                                                                               | 4,8-4,9                 |                     |
| 04.04 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer                                                                                                  | 20                      |                     |
| 04.05 | Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per kapita                                                                                     | 9.170,56                |                     |
| 04.06 | Persentase Penyelesaian Isu terkait Energi dan Sumber Daya Mineral yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri           | 90                      |                     |
| 04.07 | Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral                                              | 90                      |                     |
| 05    | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan Dan Pariwisata yang Berkualitas                                     |                         | 21.700.000,0        |
| 05.01 | Rasio PDB Industri Pengolahan                                                                                                         | 20,2-20,8               |                     |
| 05.02 | Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja                                                                                                 | 3,3                     |                     |
| 05.03 | Proporsi Penciptaan Tenaga Kerja Formal                                                                                               | 41,33                   |                     |
| 05.04 | Rasio PDB Pariwisata                                                                                                                  | 4,6                     |                     |
| 05.05 | Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional                                                                                     | 100 (32 dari 32 proyek) |                     |
| 05.06 | Persentase Penyelesaian Isu terkait Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri | 90                      |                     |
| 05.07 | Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata                                    | 90                      |                     |

| KODE  | SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)                                           | TARGET 2025 | ALOKASI 2025 (RIBU) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 07    | Terwujudnya Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing          |             | 16.500.000,0        |
| 07.01 | Rasio Pertumbuhan Realisasi Investasi KEK Terhadap Pertumbuhan Realisasi Investasi Nasional | n/a         |                     |
| 09    | Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian                                    |             | 48.985.416,0        |
| 09.01 | Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian    | 100%        |                     |
| Total |                                                                                             |             | 134.285.416,0       |

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

| KODE  | OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM | ALOKASI 2025 (RIBU) |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|
| Total |                                           | 0,0                 |

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

| KODE | PROGRAM                                                                             | INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 |      |     |     |     |     |       |     |      |     |             | PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-------------|----------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                     | RP                            | PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH  | SBSN | HN  | TOTAL       | 2026                       | 2027         | 2028         |
| 2491 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital                                   | 5.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 5.500.000,0 | 6.464.650,0                | 7.567.850,0  | 7.771.050,0  |
| 2492 | Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal                                       | 3.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.500.000,0 | 3.501.000,0                | 3.502.000,0  | 3.503.000,0  |
| 2493 | Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi                 | 9.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 9.000.000,0 | 11.955.000,0               | 12.059.000,0 | 11.963.000,0 |
| 2499 | Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga | 1.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 1.500.000,0 | 2.596.385,0                | 2.604.677,0  | 2.611.677,0  |
| 2500 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional                                 | 2.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.000.000,0 | 2.005.000,0                | 2.009.000,0  | 2.014.000,0  |

| KODE | PROGRAM                                                                      | INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 |      |     |     |     |     |       |     |      |     |             | PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|      |                                                                              | RP                            | PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH  | SBSN | HN  | TOTAL       | 2026                       | 2027        | 2028        |
| 2503 | Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN       | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0 | 3.000.000,0                | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 |
| 2510 | Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral                            | 4.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 4.000.000,0 | 4.000.000,0                | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 |
| 2513 | Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral                         | 3.300.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.300.000,0 | 3.300.000,0                | 3.300.000,0 | 3.300.000,0 |
| 2514 | Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional     | 3.300.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.300.000,0 | 3.247.350,0                | 3.247.350,0 | 3.247.350,0 |
| 2519 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil | 2.700.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.700.000,0 | 2.700.000,0                | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 |
| 2521 | Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor           | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0 | 3.012.000,0                | 3.024.000,0 | 3.283.000,0 |
| 4539 | Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan                            | 4.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 4.500.000,0 | 5.510.991,0                | 5.520.995,0 | 5.530.998,0 |
| 4540 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik     | 2.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0                | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 |
| 4541 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi  | 1.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 1.500.000,0 | 1.750.000,0                | 1.750.000,0 | 1.750.000,0 |

| KODE | PROGRAM                                                                                        | INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 |      |     |     |     |     |       |     |      |     |              | PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) |              |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                | RP                            | PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH  | SBSN | HN  | TOTAL        | 2026                       | 2027         | 2028         |
| 4542 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan | 1.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 1.500.000,0  | 1.342.018,0                | 1.342.018,0  | 927.000,0    |
| 4543 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis                   | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0  | 3.075.000,0                | 3.300.000,0  | 3.025.000,0  |
| 4544 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 2.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.500.000,0  | 2.500.000,0                | 2.500.000,0  | 2.500.000,0  |
| 4545 | Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan      | 4.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 4.000.000,0  | 4.065.770,0                | 4.171.770,0  | 4.171.770,0  |
| 4546 | Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi                                       | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0  | 3.000.000,0                | 3.000.000,0  | 3.000.000,0  |
| 4550 | Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja                                                               | 6.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 6.000.000,0  | 6.300.000,0                | 6.615.000,0  | 6.945.750,0  |
| 5032 | Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi                                                        | 33.985.416,0                  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 33.985.416,0 | 35.734.276,0               | 35.753.276,0 | 35.752.276,0 |
| 5266 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis                         | 15.000.000,0                  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 15.000.000,0 | 15.000.000,0               | 15.000.000,0 | 15.000.000,0 |
| 6920 | Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK                        | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0  | 3.000.000,0                | 3.000.000,0  | 3.000.000,0  |

| KODE | PROGRAM                                                                                           | INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 |      |     |     |     |     |       |     |      |     |             | PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                   | RP                            | PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH  | SBSN | HN  | TOTAL       | 2026                       | 2027        | 2028        |
| 6921 | Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK                                           | 2.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.500.000,0 | 4.614.447,0                | 4.617.447,0 | 4.620.447,0 |
| 6922 | Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK                  | 4.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 4.000.000,0 | 4.000.000,0                | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 |
| 6923 | Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK                                  | 4.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 4.500.000,0 | 4.500.000,0                | 4.500.000,0 | 4.500.000,0 |
| 6924 | Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian        | 2.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.500.000,0 | 2.500.000,0                | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 |
| 7701 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata                                                      | 2.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0                | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 |
| 7702 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka | 3.600.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.600.000,0 | 3.600.000,0                | 3.600.000,0 | 3.600.000,0 |
| 7703 | Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata                | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0 | 3.000.000,0                | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 |
| 7704 | Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital                                     | 5.300.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 5.300.000,0 | 5.303.210,0                | 5.306.420,0 | 5.309.630,0 |
| 7706 | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi                                             | 2.750.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.750.000,0 | 2.750.000,0                | 2.750.000,0 | 2.750.000,0 |

| KODE  | PROGRAM                                                                 | INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 |      |     |     |     |     |       |     |      |     |               | PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                         | RP                            | PNBP | BLU | PLN | RMP | PDN | HIBAH | PH  | SBSN | HN  | TOTAL         | 2026                       | 2027          | 2028          |
| 7707  | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara                  | 2.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.000.000,0   | 2.000.000,0                | 2.000.000,0   | 2.000.000,0   |
| 7708  | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi         | 2.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.000.000,0   | 2.000.000,0                | 2.000.000,0   | 2.000.000,0   |
| 7709  | Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi                         | 2.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.500.000,0   | 2.500.000,0                | 2.500.000,0   | 2.500.000,0   |
| 7710  | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan      | 2.500.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 2.500.000,0   | 2.500.000,0                | 2.500.000,0   | 2.500.000,0   |
| 7711  | Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0   | 3.000.000,0                | 3.000.000,0   | 3.000.000,0   |
| 7712  | Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi         | 3.000.000,0                   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.000.000,0   | 3.000.000,0                | 3.000.000,0   | 3.000.000,0   |
| Total |                                                                         | 165.935.416,0                 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 165.935.416,0 | 176.327.097,0              | 178.440.803,0 | 178.475.948,0 |

Jakarta, 07 Januari 2025  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga  
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Susiwijono  
NIP. 196907071989121001